

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menjawab rumusan masalah dan melakukan pengujian pada hipotesis. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan terstruktur dan mengkuantifikasikan data untuk dapat digeneralisasikan (Anshori dan Iswati, 2006:13). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan adanya pengaruh variabel bebas yang diambil dari data primer berupa jawaban responden dalam kuisioner dan diukur menggunakan alat bantu statistik untuk kemudian digunakan dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasi.

3.2 Identifikasi Variabel

Variabel merupakan suatu konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai (Nazir dalam Anshori dan Iswati, 2006:56). Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah:

a. Variabel Bebas (X)

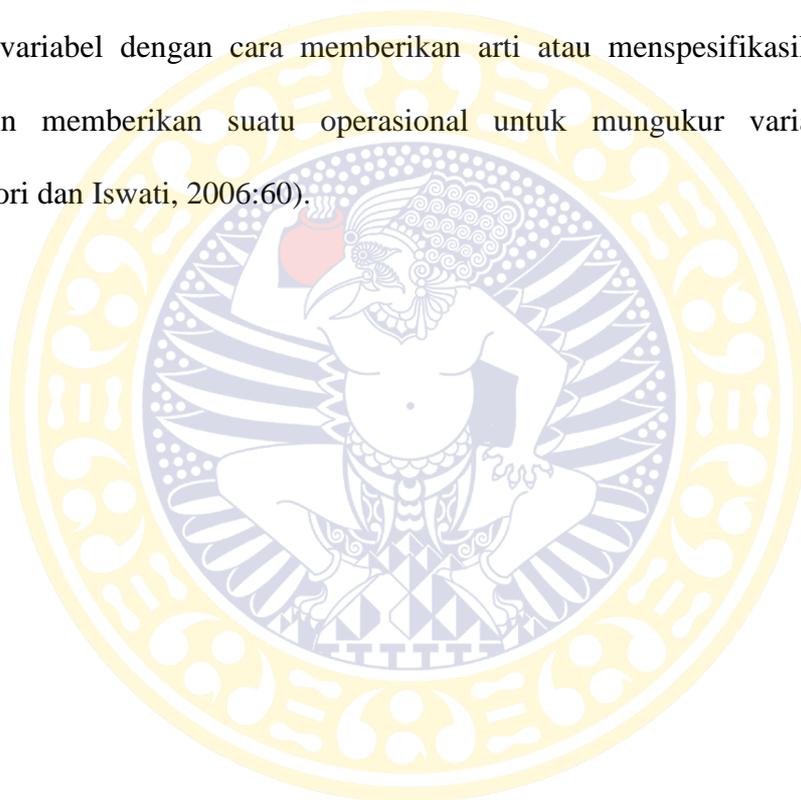
Menurut Sugiyono (2009:39) variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak (X1), kemudahan pajak (X2), dan keadilan pajak (X3).

b. Variabel Terikat (Y)

Menurut Sugiyono (2009:39) variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM (Y)

3.3 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional untuk mengukur variabel tersebut (Anshori dan Iswati, 2006:60).



Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Sumber	Cara Pengukuran	Skala Pengukuran
Pengetahuan Pajak (X1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. kepemilikan NPWP 2. sanksi perpajakan 3. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 4. PTKP, PKP dan tarif pajak 5. Wajib Pajak mengetahui dan memahami Peraturan perpajakan melalui sosialisasi 	Widayati dan Nurlis (2010)	Dengan menggunakan kuisioner yang terdiri atas 16 pertanyaan, pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala likert empat angka sebagai berikut : Sangat Tidak Setuju = 1 Tidak Setuju = 2 Setuju = 3 Sangat Setuju = 4 Selanjutnya hasil pengukuran skala likert diubah dalam bentuk data yang mudah dibaca untuk diolah lebih lanjut dalam program computer SPSS yang akan menganalisa data melalui uji kualitas, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji hipotesis	Skala Likert
Kemudahan Pajak (X2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan undang-undang yang lebih singkat dan mudah dimengerti 2. Memperluas basis pajak, yang juga berarti menghilangkan distorsi 3. Mengurangi pemotongan dan tarif pajak 	BG Consulting (2003)		
Keadilan Pajak (X3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan umum 2. Struktur tarif pajak 3. Timbal balik pemerintah 4. Kepentingan pribadi 5. Ketentuan khusus 	Azmi dan Perumal (2008)		
Kepatuhan formal Wajib Pajak (Y)	kewajiban perpajakan menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak terutang			

Sumber : diolah peneliti (2015)

3.3.1 Variabel Independen (X)

Variabel independen dari penelitian ini adalah :

1. Pengetahuan Pajak (X1)

Pengetahuan pajak adalah apa yang diketahui Wajib Pajak UMKM tentang ketentuan perpajakan secara umum dan PP Nomor 46 Tahun 2013.

Penelitian ini menggunakan lima indikator pengetahuan pajak dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010) yang telah dimodifikasi, yaitu :

- a. Pendaftaran NPWP dan NPPKP bagi Wajib Pajak yang memiliki penghasilan.

Wajib Pajak akan mendaftarkan NPWP setelah memiliki penghasilan dan mendaftarkan NPPKP setelah memenuhi persyaratan sebagai pengusaha.

- b. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan.

Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang hak-hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi terkait PP Nomor 46 Tahun 2013.

- c. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan.

Pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai macam sanksi terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 yang akan Wajib Pajak peroleh jika melakukan pelanggaran peraturan perpajakan

- d. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.

Pengetahuan dan pemahaman tentang penghasilan tidak kena pajak yang dapat Wajib Pajak peroleh dalam pengurangan penghasilan bruto.

Pengetahuan dalam menghitung penghasilan kena pajak dan tarif pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak UMKM PP Nomor 46 Tahun 2013.

- e. Cara memperoleh Pengetahuan dan pemahaman PP Nomor 46 Tahun 2013
Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan yaitu PP Nomor 46 Tahun 2013 melalui sosialisasi yang dilakukan oleh fiskus.

2. Kemudahan Pajak (X2)

Kemudahan pajak adalah kesederhanaan dalam sistem perpajakan dan administrasi perpajakan menurut persepsi Wajib Pajak UMKM terkait PP Nomor 46 Tahun 2013, disebut sederhana jika peraturan perpajakan tersebut memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. penelitian ini menggunakan tiga indikator kemudahan pajak yang digunakan dalam paper BG Consulting (2003) yang telah dimodifikasi yaitu:

- a) Pembuatan undang-undang atau PP Nomor 46 Tahun 2013 yang lebih singkat dan mudah dimengerti.

Lebih singkat berarti peraturan perundang-undangan dalam pajak dibuat lebih sederhana dan singkat. Sedangkan lebih mudah dimengerti berarti undang – undang dibuat dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana sehingga menghindari perbedaan dalam makna dan cakupan.

- b) Mengurangi pemotongan dan tarif pajak UMKM.

Administrasi pajak akan lebih masuk akal jika pemerintah menurunkan tarif pajak namun memperluas dasar pengenaan pajak dan memberikan

insentif kepada beberapa Wajib Pajak melalui pembebasan pajak dan manfaat lainnya.

- c) Memperluas basis pajak UMKM untuk menghilangkan distorsi.

Peraturan perpajakan yang kompleks juga dapat menimbulkan distorsi. Elemen distorsi mencakup peningkatan biaya administrasi yang mengakibatkan meningkatnya upaya pemerintah dalam menarik pajak, indikator ini tidak digunakan karena tidak sesuai dengan penelitian

3. Keadilan Pajak (X3)

Keadilan pajak adalah sistem perpajakan yang adil menurut persepsi Wajib Pajak UMKM PP Nomor 46 tahun 2013. Penelitian ini menggunakan lima indikator keadilan pajak yang digunakan dalam penelitian Azmi dan Perumal (2008) yang telah dimodifikasi, yaitu :

- a) Keadilan umum pada PP Nomor 46 Tahun 2013 (*General Fairness*)

Keadilan umum ini berhubungan dengan keadilan dari sistem pajak dan distribusi pajak terkait PP Nomor 46 Tahun 2013.

- b) Struktur tarif pajak UMKM (*Tax Rate*)

Struktur tarif pajak berhubungan dengan struktur tarif pajak yang lebih dianggap adil oleh Wajib Pajak, misalnya tariff pajak tunggal, tariff pajak progresif, tari pajak proporsional.

- c) Timbal balik pemerintah (*Exchange with the Government*)

Timbal balik dengan pemerintah berhubungan dengan manfaat yang diterima oleh pemerintah terkait pembayaran pajak UMKM PP Nomor 46 Tahun 2013.

d) Kepentingan Pribadi (*self-Interest*)

Kepentingan pribadi ini berhubungan dengan jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak UMKM jika dibandingkan dengan Wajib Pajak UMKM lain.

e) Ketentuan-ketentuan khusus

Ketentuan khusus ini berhubungan dengan adanya ketentuan khusus yang diberikan kepada Wajib Pajak UMKM PP nomor 46 Tahun 2013, misalnya pembuatan SKB.

Variabel pengetahuan pajak, kemudahan pajak dan keadilan pajak menggunakan skala likert yang telah dimodifikasi dengan interval 1 sampai 4 pada kuisioner, sehingga menghasilkan data dalam skala ordinal.

3.3.2 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan formal Wajib Pajak UMKM. Kepatuhan berarti Wajib Pajak secara sukarela memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sistem *self-assessment* yakni Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak terutangya sendiri. Variabel dependen ini diukur menggunakan kuisioner dengan skala likert dengan interval 1 sampai 4. Pengelompokan perilaku kepatuhan formal Wajib Pajak UMKM ini menggunakan empat kriteria Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 yakni:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh ijin mengangsur dan menunda pembayaran pajak.
- c. Dalam laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau badan pengawas keuangan Pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualiaan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya melalui data pustaka yang meliputi buku, jurnal, referensi atau data-data lain yang terkait dengan penelitian ini. Data primer merupakan data yang dapat diperoleh secara langsung dari responden. Dalam penelitian ini data sekunder dapat diperoleh dari KPP Pratama Surabaya Gubeng, Ruang Baca serta Perpustakaan Universitas Airlangga. Sedangkan data primer dapat diperoleh dengan cara membagikan kuisioner kepada Wajib Pajak UMKM sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Gubeng.

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survey. Metode survey dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner secara

langsung kepada Wajib Pajak UMKM PP Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Surabaya Gubeng mulai tanggal 16 Januari sampai dengan 15 Maret 2015. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2009:199). Kuisioner yang disebarakan kepada responden berisi 16 pertanyaan tertutup yang terkait dengan pengetahuan pajak, kemudahan pajak dan keadilan pajak serta kepatuhan pajak. masing-masing pertanyaan diukur dengan menggunakan skala likert empat tingkat Survey kuisioner yang diberikan untuk variabel keadilan pajak merupakan modifikasi dari kuisioner yang digunakan oleh penelitian Azmi dan Perumal (2008).

3.6 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Anshori dan Iswati, 2006:46). Populasi dalam penelitian ini adalah semua Wajib Pajak UMKM yang memperoleh penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu tidak lebih dari Rp 4,8 Milyar yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Gubeng. Populasi dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel 3.1 :

Tabel 3.2
Populasi Penelitian

Keterangan	Jumlah Wajib Pajak
Wajib Pajak terdaftar 2014	44.369
Wajib Pajak efektif 2014	21.182
Wajib Pajak memiliki omzet tidak melebihi Rp 4,8 Milyar 2014	3.594

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar mewakili populasi tersebut (Anshori dan Iswati, 2006:95). Besaran ukuran sampel menggunakan rumus Isac dan Michael dalam Zaenudin (2000) karena dapat menggambarkan proporsi Wajib Pajak patuh dengan lebih baik , yaitu sebagai berikut :

$$s = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2(N - 1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

dimana :

s = Jumlah sample

N = Jumlah populasi

λ^2 = Chi Kuadrat, dengan dk = 1,96 pada α 5%

d = 0,1

P = Q = 0,5

Sehingga

$$s = \frac{3594 \times (1,96)^2 \times 0,5 \times 0,5}{(3594-1) \times (0,1)^2 \times (1,96)^2 \times 0,5 \times 0,5}$$

s = 93,57 dibulatkan menjadi 100

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini harus memenuhi 2 (dua) syarat penting yang berlaku pada sebuah angket yaitu *valid* dan *reliable*. Suatu kuesioner dikatakan *valid* (sah) jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner, sedangkan suatu kuesioner dikatakan *reliable* (andal) jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu (Santoso, 2000).

1. Uji validitas data bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kuesioner mampu mengukur variabel yang diinginkan peneliti, karena variabel ilmu sosial bersifat abstrak. Semakin tinggi suatu validitas variabel maka tes tersebut akan semakin valid. Berdasarkan Santoso (2000) uji validitas dapat dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing item dengan skor total menggunakan korelasi *product moment* (metode interkorelasi). Berdasarkan Masrun (1979, dalam Solimun 2005) menyatakan bahwa "bilamana koefisien korelasi positif dan lebih besar dari 0,3 maka indikator bersangkutan dianggap valid".
2. Suatu kuesioner dikatakan reliabel (andal) jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui konsistensi hasil pengukuran apabila dilakukan lebih dari dua kali pengukuran terhadap objek dan alat ukur yang

sama (Nasir, 2003: 134). Uji reliabilitas yang dilakukan adalah dengan menggunakan *Reliability Analysis* dengan parameter yang digunakan adalah dengan *cronbach alpha*. "Kuisisioner yang reliabel adalah kuisisioner yang mempunyai nilai *cronbach alpha* diatas 0,6".

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah penggunaan model Regresi Linier Berganda akan menganalisis telah memenuhi asumsi klasik. Model Regresi Linier Berganda akan lebih tepat digunakan jika memenuhi asumsi sebagai berikut:

1. Normalitas.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model pengujian, variabel pengganggu terdistribusi normal. Pada penelitian ini untuk melakukan uji normalitas digunakan Chi-Square Goodness-of-fit-test. Kriteria keputusan dapat dilihat signifikan hasil perhitungan, apabila nilai tersebut lebih besar dari 0,05 (α) maka distribusi data dinyatakan normal.

2. Multikolinieritas.

Multikolinieritas adalah situasi adanya multi korelasi di antara variabel independen satu dengan yang lainnya atau dengan kata lain di antara variabel-variabel independen tersebut dapat dibentuk hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Uji gejala multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan antar masing-masing variabel bebas yang diteliti. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala ini digunakan indikasi nilai VIF (*Varian Inflation Factor*). Uji gejala

multikolinieritas dimaksudkan untuk lebih mengetahui adanya hubungan yang sempurna antar variabel dalam model regresi. Ghazali, 2006:103 menyebutkan angka toleransi VIF untuk terhindar dari gejala multikolinieritas ini antara 1 – 5.

3. Heterokedastisitas

Pengujian gejala heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual sesuatu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas dapat dilihat dari grafik *scatterplot*. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006:105).

3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk memprediksi besar variabel tergantung (Y) dengan menggunakan data variabel bebas (X) yang sudah diketahui besarnya (Santoso, 2000). Regresi linier berganda diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- | | |
|-----------------------------|---|
| Y | = Kepatuhan formal Wajib Pajak UMKM |
| a | = Konstanta |
| e | = Suku kesalahan, berdistribusi normal dengan rata-rata 0, untuk tujuan perhitungan e diasumsikan 0 |
| $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ | = Koefisien regresi yang ditaksir dengan n buah pasangan data yang didapat dari persamaan |

X_1 = Pengetahuan Pajak

X_2 = Kemudahan Pajak

X_3 = Keadilan Pajak

3.7.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan *t-test* untuk menguji pengaruh variabel secara parsial terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini tingkat signifikan yang digunakan adalah 5%. Langkah-langkah dalam melakukan uji t adalah sebagai berikut :

a. Menentukan hipotesis statistik H_0 dan H_a

$H_0 : \beta_1 = 0$, berarti bahwa masing-masing variabel bebas secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel terikat kepatuhan formal Wajib Pajak.

$H_a : \beta_1 \neq 0$, berarti bahwa masing-masing variabel bebas secara individual berpengaruh terhadap variabel terikat kepatuhan formal Wajib Pajak.

b. Menentukan taraf signifikan ($\alpha = 5\%$)

c. Menghitung besarnya t_{hitung} dengan menggunakan SPSS 18

d. Menentukan daerah penolakan hipotesis ;

1. Jika signifikansi $t > 0,05$ (α) maka H_0 diterima (H_a ditolak).

2. Jika signifikansi $t \leq 0,05$ (α) maka H_0 ditolak (H_a diterima).

Melakukan interpretasi hasil oleh data.